

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018–2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan tugas dan pengabdian sesuai dengan target kinerja yang tertuang pada Renja 2020 ini dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sinjai, Januari 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Sinjai

ANDI TENRI RAWE BASO, ST.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana kerja-Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah. Rencana

kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan

perempuan demikian juga anak. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi perlu ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai, termasuk kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RenjaPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010tentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162),;
19. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan lembaran daerah kabupaten Sinjai Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dimaksudkan :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan setelah satu semester pelaksanaannya dan sebagai penjabaran Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Mensinergikan hasil Musrenbang dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai fungsi dan peran.
3. Mendiskripsikan fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja DP3AP2KB, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPPD dan Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023.

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPPD

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

EVALUASI CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD tahun berjalan yang dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022	
			4		5		6		
			K	Rp (RENJA)	K	Rp	K	Rp	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	Target	Satuan	3.408.217.218,-	Realisasi	3.074.280.860,-	Bobot	Capaian
1	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	6	Dokumen	30.182.615,-	12	30.181.400,-	0.38	100
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	31	Asn	3.224.072.088,-	28	2.934.85.4934,-	40.11	91.03
3	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	40.473.600,-	12	39.750.000,-	0.50	98.21
4	Pelaksanaan dan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	28.460.925,-	12	28.460.925,-	0.35	100,00
5	Penyediaan Barang Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24	eksemplar	2.800.000,-	2	2.760.000,-	0.03	98.57
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	46.891.000,-	30	46.891.000,-	0.02	100
7	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	9.700.000,-	36	7.948.100,-	0.12	81.94

8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	unit	23.807.000,-	4	23.806.400,-	0.30	100
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peranlatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	3	Unit	1.830.000,-	3	1.830.000,-	0.02	100
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	96.06
Predikat kinerja								ST	ST
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif Gender (PPRG)	100	%	8.790.880,-		8.790.880,-		
10	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG dan PPRG	42	PD	8.790.880,-	42	8.790.880,-	0.11	100
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	100,00
Predikat kinerja								ST	ST
III	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan layanan	70	%	173.959.000,-		113.635.700,-		
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Dearah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	50.610.700,-	3	50.610.700,-	0.63	100
12	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	25	orang	7.600.000,-	0.09	7.480.000,-	100.00	100
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	25	Layanan	95.328.300,-		41.125.000,-	0.25	7062

	Kabupaten/Kota	dan Sinkronisasi							
14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi perempuan Korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi perempuan Korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	8	orang	20.420.000,-		14.420.000,-	0.25	70.62
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	32,69
Predikat kinerja								ST	ST
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	jumlah Keluarga yang mendapatkan advokasi dan informasi peningkatan kualitas keluarga	100	%	27.000.660,-		27.000.660,-		
15	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Kompresensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Layanan	27.000.660,-	1	27.000.360,-	0.34	100
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	94,52
Predikat kinerja								ST	ST
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang memiliki Data Gender dan anak	100	%	3.008.000		3.007.760,-		
16	Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang Memiliki data Gender dan Anak	42	OPD	3.008.000,-	42	3.007.760,-	0.04	99.99
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	100
Predikat kinerja								ST	ST
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan anak	100	%	285.441.000,-		167.251.250,-		
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	3	Dokumen	62.339.300,-	3	61.265.250,-	0.78	98.28

		Kabupaten/Kota							
18	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tk. Daerah/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Layanan	166.715.700,-	7	53.350.000,-	32.00	33.00
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus TK. Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus TK. Daerah Kabupaten/kota	1	dokumen	56.386.000,-	1	52.636.000,-	0.70	93.35
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	99.86
Predikat kinerja								ST	T
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	96.06
Predikat kinerja								ST	ST
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan Kebutuhan Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	%	13.564.700,-		12.761.500,-		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	13.564.700,-	12	12.761.500,-	0.17	94.08
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	100
Predikat kinerja								ST	ST
VIII	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan data kependudukan yang dimanfaatkan wilayah kabupaten	100	%	112.795.000,-		112.795.000,-		
21	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	67000	kk	9.595.000,-	67000	9.595.000,-	0.12	100
22	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan pelayanan KB	9	Laporan	103.200.000,-	9	103.200.000,-		

Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	100
Predikat kinerja								ST	ST
IX	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase perempuan usia reproduksi yang menggunakan metode kontrasepsi (CPR)	52	%	1.815.937.900,-		1.577.756.542,-		
23	Advokasi program KKBPK kepada Stakeholder dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi program KKBPK kepada Stakeholder dan mitra kerja	33	OPD	4.375.000,-		4.375.000,-	0.05	100
24	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	9	Dokumen	25.000.000,-	12	25.000.000,-	0.31	100
25	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2	Paket	70.640.000,-		67.220.000,-	0.88	95.16
26.	Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rekorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minulok)	Jumlah Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi koordinasi kecamatan (rekorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minulok)	13	Kampung KB	140.400.000,-		108.450.000,-	1.75	77.24
27	Pengelolaan Operasional di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengelolaan Operasional di Balai Penyuluhan KKBPK	9	Kecamatan	364.500.000,-	12	299.069.290,-	1.75	77.24
28	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	9	laporan	40.000.000,-	2	39.760.000,-	0.54	99.40
29	Penguatan Pelaksanaan penyuluhan Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Penyuluhan Keluarga berencana yang mendapatkan pembinaan	70	Orang /Perdesa	153.180.000,-	12	127.095.000,-	1.91	82.97

30	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD sub PPKBD yang mendapatkan pembiayaan operasional	449	orang	384.000.000,-		383.025.000,-	4.78	100
31	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	23	laporan	10.350.000,-	12	10.350.000,-	0.13	100
32	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4500	Akseptor	396.242.900,-	105	289.712.252,-	4.93	73.11
33	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan termasuk jejaring dan jejaringannya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan termasuk jejaring dan jejaringannya	23	Laporan	3.000.000,-		3.000.000,-	4.93	100
34	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	13	Lokasi	224.250.000,-	13	219.725.000,-	2.79	97.98
Rata-rata capaian kinerja (%)								98	84
Predikat kinerja								ST	ST
X	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Poktan yang Melaksanakan program Bangsa kencana	100	%	2.188.636.000,-		1.575520.000,-		
35	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPP PKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPP KS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	350	orang	949.876.000,-	4	866.440.000,-	11.8 2	100

36	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPP KS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPK S,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/ UPPKS)	350	orang	1.238.760.000,-	17	709.080.000,-	15.4 1	57.24
Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	100
Predikat kinerja								ST	ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					8.037.350.368,-		6.715.001.671,-	83,55	83,55
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)								83,55	83,55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)								ST	ST

Alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.037.350.368,- dan yang terealisasi adalah Rp 6.715.001.671,- dengan persentase serapan anggaran untuk Tahun 2022 sebesar 83,55%

2.2. Analisis Kinerja

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka

menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

Tabel 2.2
**CAPAIAN KINERJA DAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. SINJAI**

NO	INDIKATOR KINERJA (IKU, IKK, SDGS,)	TARGE T IKU	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADATAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	45,75	45,71	45,80	45,85	45,90	45,95	67,13	53,48	39,03	65,59	64,14	146,86	116,77	85,13	142,90	139,59
2	Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPRD	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	26,67	26,67	26,67	26,67	100	114,32	114,32	114,32	114,32
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	32,00	32,15	32,20	32,25	32,30	32,35	32,86	32,91	60,97	34,40	35,87	102,20	101,89	189,05	106,50	110,88
4	Rasio KDRT	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,013	0,016	0,003	0,009	100	162,5	200	37,5	112,5
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	53,00	53,20	53,25	53,30	53,35	53,40	53,48	53,48	95,67	96,83	96,90	100,52	100,43	179,49	181,49	181,46
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu Kabupaten Sinjai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi social yg diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100	28,57	5,91	12,91	100	100	28,56	5,91	12,91	100
10	Cakupan penegakan hukum dr tingkat penyidikan sampai dgn putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	6,66	8,11	100	100	100	6,66	8,11	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasaan	100	100	100	100	100	100	16,28	1,67	8,11	35,71	49,05	16,28	1,67	8,11	35,71	49,05

13	Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	16,28	1,67	8,11	35,71	75,00	16,28	1,67	8,11	35,71	75,00
22	Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	100	100	100	100	100	100	59,52	59,52	80,95	80,95	80,95	59,52	59,52	80,95	80,95	80,95
28	Rasio Akseptor KB	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	73,38	74,21	74,53	74,26	52,55	146,76	148,42	149,06	148,52	105,1
29	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 - 49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	79,97	81,69	78,48	73,01	79,97	159,94	163,38	156,96	146,02	159,94
30	Angka Kelahiran remaja (Perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	91,1	98,96	98,96	100	100	183,82	197,92	197,92
31	Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	23,49	22,54	21,06	22,87	21	46,98	45,08	41,12	45,74	42
32	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	19,63	21,67	24,02	26,64	23,39	39,26	43,34	48,04	53,28	46,78
33	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	73,38	74,21	74,53	74,26	52,22	146,76	148,42	149,06	148,52	104,44

34	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	50,00	47,31	55,60	83,24	83,24	83,24	51,11	47,31	55,60	83,24	73,01	107,12	85,08	66,79	100	87,71
35	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	50,00	54,99	57,05	57,05	57,05	57,05	54,53	54,99	45,89	57,05	69,12	99,16	96,38	80,43	100	121,15
36	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB	50,00	47,03	48,88	62,10	62,10	62,10	48,43	47,03	48,79	62,10	68,17	102,97	96,21	78,56	100	109,77
37	Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	100	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	100	100	100	100	100
38	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja /mahasiswa Kabupaten Sinjai	50,00	8,22	8,22	6,11	6,11	6,11	6,33	8,22	8,22	6,11	6,11	77,00	100	134,53	100	100
39	Cakupan PKB/PLKB yg di dayagunakan perangkat Daerah KBuntuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerahdi bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	92,00	92,00	100	100	100	92,00	92,00	100	100	100
40	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber -KB mandiri	50,00	52,98	52,98	51,44	51,44	51,44	50,76	52,98	52,98	51,41	70,20	95,80	100	102,99	99,94	136,46

41	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2,40	2,40	2,22	2,14	2,14	2,14	30,47	30,47	69,11	46,70	59,34	1269,58	1372,52	3229,43	2182,24	2772,89
43	Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yg bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dgn standarnisasi pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencanadan pembangunan keluarga melalui APBD & APBDesa	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,68	0,50	0,03	0,03	116	136	100	6	6

Dari tabel 2.2 diatas diketahui bahwa beberapa indikator kinerja sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 belum sepenuhnya dapat dicapai dikarenakan adanya indikator baru setelah sebelumnya tercantum pada indikator Permendagri 54 Tahun 2010. Selain itu, indikator yang menjadi urusan Dinas P3AP2KB cukup banyak, hal ini dikarenakan Dinas P3AP2KB melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, faktor lain dari tidak tercapainya indikator adalah indikator tersebut menjadi kewenangan organisasi perangkat lain dan data tidak lengkap.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai mengambil strategi untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kinerja yang menjadi fokus bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2023 memperhatikan data yang ada yang berkembang pada tahun sebelumnya, selain itu isu yang menjadi fokus pada Renstra juga menjadi perhatian dalam penentuan isu strategis setiap tahunnya.

Dengan melaksanakan 2 urusan data yang mejadi landasan fokus bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2023 antara lain :

Tabel 2.3.1

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK Tk. KECAMATAN KAB. SINJAI TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	Penganiayaan	Membawa lari Anak	ABH (Pelaku Pengeroyokan)	Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur	Penganiayaan terhadap Anak dibawah Umur	Pelecehan Seksual terhadap anak	Kekerasan Fisik	Pengeroyokan	Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur	Penelantaran Anak	Hak Asuh Anak	TOTAL
1	SINJAI BARAT	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	SINJAI SELATAN	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	7
3	SINJAI TIMUR	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
4	SINJAI TENGAH	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
5	SINJAI UTARA	5	1	9	1	1	0	0	1	0	0	1	19
6	BULUPODDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	SINJAI BORONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TELLU LIMPOE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
9	PULAU IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		13	1	9	4	1	1	2	2	1	1	2	37

Tabel 2.3.2

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Tk. KECAMATAN KAB. SINJAI TAHUN 2022

NO	Kecamatan	Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)	persetubuhan	penelantaran	persinahan	Kekerasan Fisik	Penganiayaan	Pkekerasan seksualn	pencabulan	TOTAL
1	SINJAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SINJAI SELATAN	2	0	0	0	0	0	1	0	3
3	SINJAI TIMUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	SINJAI TENGAH	1	1	0	0	0	0	0	0	2
5	SINJAI UTARA	3	2	1	0	1	0	0	1	8
6	BULUPODDO	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	SINJAI BORONG	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	T.LIMPOE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	PULAU IX	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL		5	3	1	1	2	1	1	1	16

Tabel 2.3.3

DATA PENCAPAIAN PESERTA KB BARU Tk. KECAMATAN KAB. SINJAI TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	TOTAL PPM PB 2020	Realisasi Penc. PB Tahun 2020	% Terhadap PPM PB	Permix Kontrasepsi							KATEGORI	
					IUD	MOW	MOP	KDM	IMPLANT	STK	PIL	MKJP	NON MKJP
1	SINJAI BARAT	618	541	87,54	13	0	0	48	92	217	171	105	388
2	SINJAI SELATAN	1.324	441	33,31	6	0	1	16	58	257	103	60	360
3	SINJAI TIMUR	1.030	888	86,21	2	0	0	85	127	292	382	129	674
4	SINJAI TENGAH	822	666	81,02	4	0	2	8	199	331	122	205	453
5	SINJAI UTARA	840	935	111,31	92	0	216	101	316	111	99	624	210
6	BULUPODDO	421	254	60,33	0	0	0	11	52	129	62	52	191
7	SINJAI BORONG	674	589	87,37	1	0	0	4	78	199	307	79	506
8	TELLULIMPOE	1041	534	51,30	1	0	11	9	192	257	64	204	321
9	PULAU IX	158	210	132,91	1	0	0	0	15	50	143	15	193
TOTAL		6928	5058	73,01	120	0	230	282	1129	1844	1.453	1.447	3.296

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan perempuan untuk terlibat bekerja pada lembaga pemerintah/birokrasi, lembaga legislatif dan lembaga swasta.
2. Meningkatkan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada seluruh perangkat daerah, termasuk penggunaan data terpilah gender
3. Meningkatkan jejaring pelaporan kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak.
4. Melakukan upaya tindak pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatkan kualitas unit pelayanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak serta layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum.
6. Tersedianya kebijakan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana level daerah
7. Melakukan pencegahan untuk menghindari angka drop out akseptor KB dan melakukan penguatan pengguna KB metode kontrasepsi jangka panjang
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta pemenuhan hak perempuan dan anak.
9. Meningkatkan kepesertaan Ber-KB dalam menekan dampak laju pertumbuhan penduduk, dengan memperhatikan angka TFR, CPR, ASFR dan unmeet need.

Dengan melaksanakan 9 (sembilan) isu strategis tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai berperan serta mengatasi permasalahan dari mulai tingkat dasar yaitu mulai dari manusia lahir sampai kepada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, demikian pula peningkatan kualitas keluarga, melalui pelaksanaan 2 (dua) Urusan Wajib yaitu: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diurutkan sesuai prioritas.

2.4. Review Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat dan berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stake holder, dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap perangkat daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyiapkan rancangan RENJA perangkat daerah. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan untuk tahun yang direncanakan.

Review rancangan awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari analisis kebutuhan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2023 dengan menganalisis lokasi, indikator kinerja, target capaian serta kebutuhan dana dengan catatan penting.

Tabel 2.4

**REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SINJAI**

No	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Program/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sinjai	nilai LHE Sakip	73.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sinjai	nilai LHE Sakip	73.07	3.586.391.847,-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	30.000.000 ,-
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sinjai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sinjai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.357.321.702,-
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sinjai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sinjai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	40.473.600,-

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sinjai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sinjai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	30.429.225,-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	3.000.000,-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sinjai	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 laporan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sinjai	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 laporan	2.880.000,-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinjai	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinjai	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	65.885.400,-
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sinjai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sinjai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3.330.000,-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	4.950.000,-

10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sinjai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sinjai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	21.030.600,-
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sinjai	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sinjai	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	25.578.000,-
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		22.479.000,-
12	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	42 PD	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	42 PD	14.555.280,-
13	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	Sinjai	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	1 dokumen	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Sinjai	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	1 dokumen	7.923.720,-

	Sosial dan Ekonomi		Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Ekonomi		Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sinjai	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan		202.750.000,-
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah /Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Kasus	56.750.000,-
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Layanan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Layanan	108.404.000,-

16	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	37.596.000,-
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sinjai	Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan konseling keluarga		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sinjai	Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan konseling keluarga		7.339.080,-
17	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan	7.339.080,-
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sinjai	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sinjai	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak		4.474.000,-
18	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	1 dokumen	4.474.000,-

VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sinjai	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas Hidup Anak		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sinjai	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas Hidup Anak		147.683.800,-
19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	50.083.800,-
20	Penyediaan layanan peningkatan kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Penyediaan layanan peningkatan kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	Penyediaan layanan peningkatan kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Penyediaan layanan peningkatan kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	97.600.000,-
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sinjai	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sinjai	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus		237.770.001,-
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	1 Perangkat daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	1 Perangkat daerah	1.720.001,-

	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota		Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	52.950.000,-
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan pelaksanaan pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Layanan pelaksanaan pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	38 layanan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan pelaksanaan pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	Tersedianya Layanan pelaksanaan pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	38 layanan	146.100.000,-
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.000.000,-

VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Sinjai	Jumlah Akseptor KB		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Sinjai	Jumlah Akseptor KB		197.452.283,-
25	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sinjai	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	3.652.283,-
26	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Sinjai	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	9 laporan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Sinjai	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	9 laporan	64.200.000,-
27	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Sinjai	Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	9 laporan	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Sinjai	Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	9 laporan	75.600.000,-
28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sinjai	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sinjai	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	54.000.000,-

IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Sinjai	Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi (CPR)		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Sinjai	Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi (CPR)		2.220.538.571,-
29	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 organisasi	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sinjai	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 organisasi	80.000.000,-
30	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Sinjai	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Sinjai	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	150.000.000,-

31	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Sinjai	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Sinjai	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	1 laporan	117.000.000,-
32	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Sinjai	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Sinjai	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB)	1 laporan	433.350.000,-
33	Pengendalian Program KKBPK	Sinjai	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	Pengendalian Program KKBPK	Sinjai	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	80.000.000,-
34	Pembinaan IMP dan Program KKBPK diLini lapangan oleh PKB/PLKB	Sinjai	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program KKBPK diLini lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	Pembinaan IMP dan Program KKBPK diLini lapangan oleh PKB/PLKB	Sinjai	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program KKBPK diLini lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	160.000.000,-
35	Penguatan Pelaksanaan	Sinjai	Terlaksananya Penguatan	69 laporan	Penguatan Pelaksanaan	Sinjai	Terlaksananya Penguatan	69 laporan	125.297.571,-

	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
36	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Sinjai	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300 orang	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Sinjai	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300 orang	74.000.000,-
37	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sinjai	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sinjai	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	21.600.000,-

38	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sinjai	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5000 orang	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sinjai	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5000 orang	593.684.000,-
39	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Sinjai	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	12 Unit	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Sinjai	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	12 Unit	160.407.000,-
40	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sinjai	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sinjai	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	14.700.000,-
41	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Sinjai	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	13 Dokumen	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Sinjai	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	13 Dokumen	9.000.000,-
42	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Sinjai	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	13 Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Sinjai	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	13 Kampung KB	201.500.000,-

X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Sinjai	Persentase poktan yang melaksanakan Program Bangga Kencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Sinjai	Persentase poktan yang melaksanakan Program Bangga Kencana		2.098.420.200,-
43	Pengadaan sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Set	Pengadaan sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Set	360.000.000,-
44	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah kelompok kegiatannya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300 KLP	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah kelompok kegiatannya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300 KLP	1.260.000.000,-
45	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	94.137.000,-

46	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Sinjai	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	600 keluarga	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Sinjai	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	600 keluarga	54.330.000,-
47	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 organisasi	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 organisasi	88.188.600,-
48	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Sinjai	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	2 Laporan	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Sinjai	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	2 Laporan	241.764.600,-

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis Revisi (Renstra) Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas P3AP2KB dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik dan responsif gender sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup perempuan, dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPPD) Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, serta memperhitungkan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang telah dimuat pada Renja Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PENDANAAN DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan yang dimaksud antara lain :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta pemenuhan hak perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kepesertaan Ber-KB dalam menekan dampak laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, uraian sasaran dan indikator pencapaiannya, yaitu :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam proses pembangunan
2. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi

3.2. Telaah Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan

pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, serta keluarga sejahtera.

Tujuannya adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas,2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan KemenPPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agen dan pembangunan nasional yang perlu diperhatikn sebagai berikut :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdayasaing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu ”perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai antara lain :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
2. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah <18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
6. TPAK Perempuan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun dalam 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan Presiden antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerjaan hak
5. Pencegahan perkawinan anak

Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

7 AGENDA PEMBANGUNAN	Arahan Presiden Untuk PPPA	Tujuan Kemen PPPA
 <p>Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p> 	<p>1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA 4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO 5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
 <p>Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan</p>	<p>2 Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/ Pengasuhan Anak</p>	
 <p>SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</p> 	<p>3 Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</p>	
 <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> 	<p>4 Penurunan Pekerja Anak</p>	
 <p>Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>5 Pencegahan Perkawinan Anak</p>	
 <p>Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p>		
 <p>Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p> 		

Tujuan KemenPPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA antara lain :

1. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. TPAK Perempuan
4. Indeks PUG Nasional

b. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
2. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah <usia18 tahun
3. Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA
4. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraangender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
2. Indeks Kualitas Keluarga

d. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik, domestik, tempatkerja, situasi darurat kondisi khusus dan perempuan korban TPPO serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Prevalensi perempuan usia15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber : SPHPN)
2. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni)
3. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)

e. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian

sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR)
2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)
3. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
4. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diKemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik diKemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Nilai LHE SAKIP

2. Renstra Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan. Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera

dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26% pada Tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1% pada Tahun 2024.
- b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78% pada Tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41% pada Tahun 2024.
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need* 8,6% pada Tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4% pada Tahun 2024.
- d. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada Tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada Tahun 2024.
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57% pada Tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00% pada Tahun 2024.
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9% pada Tahun 2020 dan menjadi 22,1% Tahun 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan yang disusun pada Tahun 2018 oleh Badan Pusat

Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode Tahun 2015-2020 dapat mencapai 1,11% dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95% selama periode Tahun 2020-2025.

Tujuan dari penyusunan Perubahan/Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman perubahan atau penyesuaian arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama sisa kurun waktu masa berlakunya Renstra Tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan untuk sisa kurunwaktu masa berlakunya renstra 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2023

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai pada Tahun 2023, dapat dilihat dari tabel berikut :

PROGRAM	SUB KEGIATAN
PROGRAM	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PENUNJANG	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
URUSAN	3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PEMERINTAHAN	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
DAERAH	SKPD
KABUPATEN/KOTA	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM
PENGARUSUTAMA
AN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
3. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELUARGA

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota

PROGRAM
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
4. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN / KOTA

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota
2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
6. Pengendalian Program KKBPK
7. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB / PLKB
8. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)
9. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
10. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
11. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

12. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

13. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

1. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)

TABEL. T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, P ERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. SINJAI**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.186.343.808,-			4.186.343.808,-
2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.563.847.927,-			3.563.847.927,-
2 8 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Sinjai		30.000.000,-	DAU		30.000.000,-
2 8 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Sinjai	6 Dokumen	30.000.000,-	DAU		30.000.000,-
2 8 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sinjai		3.431.224.527,-	DAU		3.431.224.527,-
2 8 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sinjai	28 Orang/bulan	3.357.321.702,-	DAU		3.357.321.702,-

2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sinjai	1 Dokumen	40.473.600,-	DAU		40.473.600,-
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sinjai	1 Dokumen	30.429.225,-	DAU		30.429.225,-
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sinjai	1 Laporan	3.000.000,-	DAU		3.000.000,-
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sinjai		68.765.400,-	DAU		68.765.400,-
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sinjai	1 Dokumen	2.880.000,-	DAU		2.880.000,-
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinjai	12 Laporan	65.885.400,-	DAU		65.885.400,-
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sinjai		4.950.000,-	DAU		4.950.000,-
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Sinjai	12 Laporan	4.950.000,-	DAU		4.950.000,-

						Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sinjai		28.908.000,-	DAU		28.908.000,-
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sinjai	5 Unit	25.578.000,-	DAU		25.578.000,-
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sinjai	3 Unit	3.330.000,-	DAU		3.330.000,-
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Sinjai		22.479.000,-			22.479.000,-
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Sinjai		14.555.280,-			14.555.280,-

2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	41 Perangkat Daerah	14.555.280,-	DAU		14.555.280,-
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Sinjai		7.923.720,-			7.923.720,-
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Dokumen	7.923.720,-	DAK		7.923.720,-
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Sinjai		202.750.000,-			202.750.000,-
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		56.750.000,-			56.750.000,-

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Dokumen	56.750.000,-	DAK		56.750.000,-
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Sinjai		108.404.000,-			108.404.000,-
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Layanan	108.404.000,-	DAK		108.404.000,-
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		37.596.000,-			37.596.000,-

2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Sinjai	5 Orang	37.596.000,-	DAK		37.596.000,-
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Sinjai		7.339.080,-			7.339.080,-
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		7.339.080,-			7.339.080,-
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sinjai	1 Layanan	7.339.080,-	DAU		7.339.080,-
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Sinjai		4.474.000,-			4.474.000,-

2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		4.474.000,-			4.474.000,-
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sinjai	1 Dokumen	4.474.000,-	DAU		4.474.000,-
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Sinjai		147.683.800,-			147.683.800,-
2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Sinjai		50.083.800,-			50.083.800,-
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Sinjai	1 Organisasi	50.083.800,-	DAU		50.083.800,-

2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Sinjai		97.600.000,-			97.600.000,-
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	25 Orang	97.600.000,-	DAU		97.600.000,-
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Sinjai		237.770.001,-			237.770.001,-
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		54.670.001,-			54.670.001,-
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Perangkat Daerah	1.720.001,-	DAU		1.720.001,-

2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Dokumen	52.950.000,-	DAK		52.950.000,-
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		146.100.000,-			146.100.000,-
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	38 Layanan	146.100.000,-	DAK		146.100.000,-
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		37.000.000,-			37.000.000,-

2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Dokumen	37.000.000,-	DAK		37.000.000,-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Sinjai		4.538.954.974,-			4.538.954.974,-
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Sinjai		22.543.920,-			22.543.920,-
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sinjai		22.543.920,-			22.543.920,-
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sinjai	1 Laporan	22.543.920,-	DAU		22.543.920,-
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Sinjai		197.452.283,-			197.452.283,-

2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Sinjai		3.652.283,-			3.652.283,-
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sinjai	1 Dokumen	3.652.283,-	DAU		3.652.283,-
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		193.800.000,-			193.800.000,-
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Sinjai	9 Laporan	64.200.000,-	DAK		64.200.000,-
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Sinjai	9 Laporan	75.600.000,-	DAK		75.600.000,-
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sinjai	1 Dokumen	54.000.000,-	DAK		54.000.000,-

2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Sinjai		2.220.538.571,-			2.220.538.571,-
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Sinjai		860.350.000,-			860.350.000,-
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sinjai	1 Organisasi	80.000.000,-	DAK		80.000.000,-
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Sinjai	1 Dokumen	150.000.000,-	DAK		150.000.000,-

2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Sinjai	1 Laporan	117.000.000,-	DAK		117.000.000,-
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sinjai	1 Laporan	433.350.000,-	DAK		433.350.000,-
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Sinjai	1 Laporan	80.000.000,-	DAK		80.000.000,-
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Sinjai		359.297.571,-			359.297.571,-

2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sinjai	1 Organisasi	160.000.000,-	DAK		160.000.000,-
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Sinjai	69 Laporan	125.297.571,-	DAK		125.297.571,-
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Sinjai	300 Orang	74.000.000,-	DAK		74.000.000,-

2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Sinjai		790.391.000,-			790.391.000,-
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sinjai	1 Laporan	21.600.000,-	DAK		21.600.000,-
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sinjai	5000 Orang	593.684.000,-	DAK		593.684.000,-
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sinjai	12 Unit	160.407.000,-	DAK		160.407.000,-
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sinjai	1 Laporan	14.700.000,-	DAK		14.700.000,-

2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Sinjai		210.500.000,-			210.500.000,-
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sinjai	13 Dokumen	9.000.000,-	DAK		9.000.000,-
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Sinjai	13 Kampung	201.500.000,-	DAK		201.500.000,-
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Sinjai		2.098.420.200,-			2.098.420.200,-
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Sinjai		1.768.467.000,-			1.768.467.000,-

2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	0 Unit	360.000.000,-	DAK		360.000.000,-
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	300 Kelompok	1.260.000.000,-	DAK		1.260.000.000,-
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	2 Laporan	94.137.000,-	DAK		94.137.000,-
2	14	4	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Sinjai	600 Keluarga	54.330.000,-	DAK		54.330.000,-

2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Sinjai		329.953.200,-			329.953.200,-
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sinjai	1 Organisasi	88.188.600,-	DAK		88.188.600,-
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Sinjai	2 Laporan	241.764.600,-	DAK		241.764.600,-

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government) sebagaimana diarpakan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan bersama ole mitra perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan yang sifatnya sinergi. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang tela ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggrana yang telah dialokasikan,tetapi difokuskanpada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektifitas mencapai tujuan dan sasaran yang tela ditetapkan. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 20

